



Pendidikan Ekologi Sebagai Strategi Optimalisasi Standar Layanan Pendidikan

Wulansari Vitaloka^{1,*}, Dwi Setyorini², Alrizka Hairi Dilfa³

¹Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia.

²Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Tadulako, Indonesia.

³Universitas Negeri Semarang, Indonesia

*Email: vitalokawulans@gmail.com

Informasi Artikel	Abstrak
Kata kunci: Pendidikan; Ekologi; SPM; tata kelola pendidikan	Kunci kemajuan suatu bangsa ialah melalui pendidikan. Tolak ukur suatu keberhasilan suatu tatanan sistem pendidikan yang baik apabila lembaga pendidikan menjadikan Standar Nasional Pendidikan sebagai indikator Mutu dan Layanan Pendidikan. Maka untuk itu tujuan penulisan artikel ini bertujuan mengidentifikasi Ekologi Pendidikan dalam meningkatkan standar layanan pendidikan dan strategi implementasinya pada pendidikan melalui sinergitas dengan ekologi pendidikan. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan tinjauan studi pustaka. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui literature terkait dengan analisis isi (<i>contents</i>). Ketepatan kajian dan mencegah kesalahan informasi dalam analisis data maka dilakukan triangulasi antara tinjauan pustaka dengan <i>memberchecking</i> . Penelitian ini memperoleh informasi mengenai ekologi pendidikan untuk mencapai mutu Standar Layananan Pendidikan. Standar Layananan Pendidikan merupakan pelayanan dasar adalah pelayanan publik berisi amanat yang berisi point-point pokok sebagai rambu-rambu ataupun pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Ekologi menawarkan suatu konsepsi Strategi implementasi SPM-Pendidikan melalui Sinergitas antara setiap komponen-komponen dalam ekosistem pendidikan. Dengan kata lain lingkungan menjadi pertimbangan penting dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
Diterima: 24-02-2022 Disetujui: 03-04-2022 Dipublikasikan: 26-10-2022	Abstract The key to the progress of a nation is through education. The benchmark for the success of a good education system arrangement is when educational institutions make the National Education Standards an indicator of Quality and Educational Services. Therefore, the purpose of this article is to identify Education Ecology in improving educational service standards and implementation strategies in education through synergy with educational ecology. The research method used is descriptive with a literature review. The data obtained were collected through the literature related to content analysis. The accuracy of the study and preventing misinformation in data analysis is then carried out by triangulation between literature review and member checking. This study obtained information about the ecology of education to achieve the quality of Education Service Standards. Education Service Standards are basic services, which are public services containing a mandate that contains main points as signs or guidelines in the implementation of education. Ecology offers a conception of the MSS-Education implementation strategy through synergy between each component in the education ecosystem. In other words, the environment is an important consideration in optimizing the implementation of education in Indonesia.



PENDAHULUAN

Pendidikan adalah tumpuan segala harapan karena pendidikan adalah modal yang jauh lebih bernilai bagi masa depan manusia, maka oleh sebab itu pendidikan hendaknya berakar pada cita-cita bangsa. Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Kunci untuk semua kemajuan suatu bangsa harus berbanding lurus dengan perkembangan pendidikannya. Dengan pendidikan akan mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia baik secara pribadi itu sendiri maupun terhadap sesama masyarakat dan lingkungan. Manusia dapat mewujudkan semua potensi dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Namun dalam hal itu negara berkewajiban memberikan layanan pendidikan kepada warganya.

Pemerintah secara regulatif berupaya memberikan kebijakan untuk menggiring pendidikan dalam mencapai visinya. Baru-baru ini salah satu kebijakan yang menjadi gebrakan baru dalam pendidikan ialah Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, secara akronim dikenal MBKM. Maka dari itu seluruh ekosistem pendidikan berkewajiban untuk mendukung kebijakan tersebut sehingga Tujuan Pendidikan Nasional dapat tercapai dengan baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Febrianshari *et all* (2018) bahwa Tujuan pendidikan Nasional merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap lembaga.

Selain dari pada itu setiap satuan pendidikan memberi tanggapan yang positif dan layak untuk menerapkan standar Nasional pendidikan, namun tetap saja terjadi ketimpangan antara pendidikan dipusat kota dengan pendidikan di pelosok Negeri. Masyarakat sudah terlanjur berharap Pendidikan merupakan bagian dari pelayanan pemerintah terhadap setiap warganya, namun persoalan kesenjangan pendidikan dan ketidakpuasan masih saja terjadi, sama halnya seperti layanan publik lainnya beberapa program transformasi reformasi seolah-olah tidak pernah berhasil (Anggraeni, 2014) Gayung bersambut tentang itu atas apa yang disampaikan oleh Maryam (2017) Konsep *good governance* muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik.

Menurut pandangan penulis Pendidikan saat ini mengalami kemerosotan karena persoalan hubungan horizontal lembaga pendidikan dalam menjalankan wewenangnya. Menjulung tinggi bak serupa menara gading namun belum adanya belum adanya pertimbangan mendatar yakni sinergitas antar lingkungan yang baik antara. Suatu pelayanan pendidikan yang baik diberikan pemerintah tidak luput dari sinergitas dari segala pihak. Pendidikan tetaplah menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Kharismawati (2022:40) Kerja sama itu dilakukan melalui peranorang tua sebagai pembimbing, fasilitator, motivator, dan pengawas dalam mengerjakan tugas dari guru pelajaran di sekolah.

Pendidikan yang ideal pada dasarnya adalah suatu proses menumbuh kembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat, membudaya, dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, Nasional dan global.

Sedangkan yang dimaksud UUD Sisdiknas No 20 tahun 2003 Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pemerintah dalam upayanya sudah mengatur regulasi dengan beragam akomodasi dan pertimbangan.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari ABN untuk pendidikan. Namun tatanan pelaksanaan masih timpang menimbulkan kegelisahan akademis untuk meninjau kembali dan mencari solusi dan strategi upaya memaksimalkan Standar Layanan Pendidikan di Indonesia. Melaksanakan suatu sistem tatanan yang baik apabila lembaga pendidikan menjadikan Standar Nasional Pendidikan sebagai indikator Mutu dan Layanan Pendidikan. Kebijakan pemerintah pusat terkait dengan Standar Penyampaian Layanan di bidang pendidikan sangat penting untuk dilanjutkan dan dikembangkan (Triwiyanto (2013); Ulumudin & Badrus (2019). Menurut hasil penelitian Adawiah (2011) penelitian Filosofis dalam Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dijiwai oleh cita-cita luhur sebagaimana rumusan yang termaktub dalam 3 amanat konstitusi tersebut. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bid. Pendidikan ini sebagai acuan/pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Raharjo, 2014) mengukur ketercapaian standar nasional layanan pendidikan terhadap prestasi belajar siswa di SMA. Metode survei diperoleh hasil prestasi belajar ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Peneliti (Umam, 2020) menjelaskan manajemen mutu pendidikan melalui sudut pandang pendidikan islam. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai pentingnya mutu pelayanan pendidikan. Sejalan dengan penelitian tersebut (Ahmad & Diah, 2020) melaporkan pencapaian standar layanan pendidikan khusus nonformal pada pusat belajar masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa strategi pengelolaan pelayanan pendidikan nonformal baru mencapai 67,79% dalam standar pengelolaan pendidikan. Artinya diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan standar layanan pendidikan.

Pendidikan berbasis lingkungan dikembangkan salah satunya sebagai kurikulum berbasis lingkungan hidup pada program Adiwiyata Mandiri. Program tersebut dapat menjadi dasar pengembangan pembelajaran berbasis lingkungan (Fajarisma & Adam, 2014). Pendidikan ekologi dapat dikaji dari berbagai macam pandangan diantaranya adalah perspektif islam dan pendidikan karakter (As-sayyidi, 2016; Yuliawan & Taryatman, 2020). Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan ekologi penting untuk ditelusuri keterkaitannya terhadap strategi optimalisasi standar layanan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan analisis mendalam mengenai ekologi pendidikan sebagai Strategi Optimalisasi Standar (SPM) layanan pendidikan berbasis lingkungan. Tujuan dari artikel ini ialah mengkaji hubungan standar layanan Pendidikan dan menganalisis Upaya ataupun Strategi Optimalisasi Standar Layanan Pendidikan atas konsepsi Ekologi pendidikan.

METODE

Metode yang digunakan penelitian ini adalah analisis deskriptif melalui tinjauan terhadap literatur. Pendekatan yang digunakan adalah Studi Pustaka yaitu kegiatan mengumpulkan, membaca dan mencatat literatur/ buku-buku (Sari & Asmendri (2020). Jadi Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, dan artikel-artikel terkait.

Tahapan dalam melakukan studi kepustakaan ini beracuan kepada prosedur penelitian pustaka ialah sebagai berikut : 1) Pemilihan topik; 2) Eksplorasi informasi; 3) Menentukan fokus penelitian; 4) Pengumpulan sumber data; 5) Persiapan penyajian data dan 6) Penyusunan paper (Mirzaqon & Purwoko, (2017)). Selanjutnya Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*Content Analysis*). Sebagaimana yang digunakan Sari & Asmendri (2020) bahwasannya teknik yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah analisis data model Miles dan Huberman. Analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup.

Teknik analisis data menggunakan 2 tahap yang dilakukan yaitu: 1) Tahap pertama analisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk memperoleh inti dari fokus penelitian melalui sumber-sumber yang dikumpulkan, proses ini dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan permasalahan yang dikaji; 2) Tahap Kedua, menganalisis data yang sudah terkumpul dengan menentukan hubungan satu sama lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Pelayanan Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Seyogyanya apabila dari segi fungsi Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan Nasional yang bermutu. Yang Tujuannya menjamin mutu pendidikan Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 14 Desember 2018 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada 20 Desember 2018. Sehingga Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan mulai diberlakukan. Kebijakan ini mencabut dan mengganti Permendikbud lama yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal yaitu Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 dan Permendikbud 23 Tahun 2013 tentang standar layanan pendidikan Dasar.

Pembaharuan dalam Sistem Pendidikan Nasional menuntut tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah daerah dalam mengarahkan, mengawasi, serta memberikan layanan pendidikan guna

terselenggaranya pendidikan yang memenuhi standar Nasional pendidikan. Standar pelayanan minimum bidang pendidikan yang merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Adawiah (2011) berpendapat dalam Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dijiwai oleh cita-cita luhur sebagaimana rumusan yang termaktub Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan mencabut dan mengganti Permendikbud lama yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal yaitu: 1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013. Standar Pelayanan Minimum Pelayanan Pendidikan ini sebagai acuan/pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam rangka pembangunan manusia yang berilmu pengetahuan, mampu membangun dan menguasai teknologi, serta berdaya saing tinggi (Adawiah, 2011).

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari : (1). Standar Kompetensi Lulusan; (2). Standar Isi; (3). Standar Proses; (4). Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; (5). Standar Sarana dan Prasarana (6). Standar Pengelolaan (7). Standar Pembiayaan Pendidikan; (8). Standar Penilaian Pendidikan. Delapan Standar Pelayanan Pendidikan (SPM) dibuat dengan berbagai landasan hukum dari undang-undang, dan pemerlainnya. Serta ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip: (a) Kesesuaian kewenangan; (b). Ketersediaan; (c). Keterjangkauan; (d). kesinambungan; (e). Keterukuran; dan (f). Ketepatan sasaran.

Sedangkan untuk Layanan Pendidikan Tinggi diatur dalam Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015. Tidak jauh berbeda dengan pendidikan hanya lebih berkembang dan berlandaskan Tridarma Perguruan Tinggi. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan delapan standar tersebut merupakan kebijakan atau keputusan pemerintah dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman atau rambu-rambu dalam menyelenggarakan suatu layanan pendidikan.

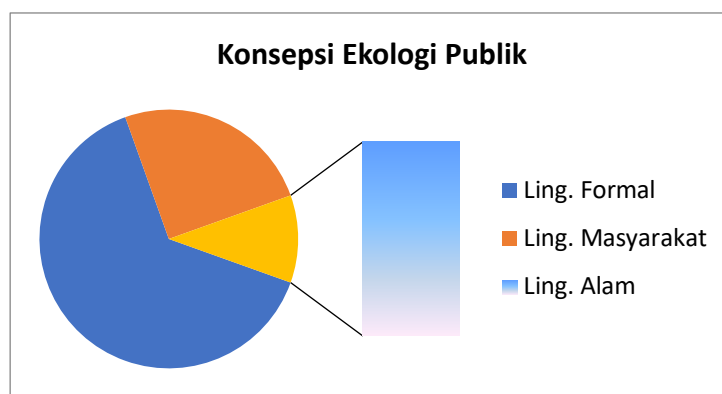
Esensi dari standar layanan pendidikan ialah Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal pendidikan tentunya fasilitas minimum pelayanan yang dijamin oleh pemerintah dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Sebagaimana disebut Winarsih, (2017) melalui pendidikan peserta Indonesia menjadi manusia yang berimbang antara segi kognitif, afektif dan psikomotorik. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM-Pendidikan) ialah hak diperoleh peserta didik dalam bentuk fasilitas barang dan jasa yang diberikan pemerintah sehingga dapat dijadikan wahana untuk mengembangkan sikap dan pengetahuan melalui lembaga formal.

Strategi Implementasi SPM Pendidikan berbasis Lingkungan

Sebagaimana pada dasarnya yang termaktub pada pasal 1 ayat 2 Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik (Kemendikbud, 2018:4) sementara (Nugroho, 2008) Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Anggraeni (2014) berpendapat Pemerintah mempunyai peran yang cukup besar untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu wujud nyatanya adalah melalui penyelenggaraan pelayanan pendidikan, namun hal masih menjadi persoalan menurut (Maryam, 2017) masih minimnya ketercepaian respon dan komunikasi yang baik antara pihak penyelenggara dengan lingkungan masyarakat penerima, Sehingga atas hal ini penulis kemukakan pentingnya kesinambungan interaksi antara lingkungan dan pelayanan pendidikan.

Maka dari itu sebagai strategi mewujudkan Standar Layanan Pendidikan, salah satu konsep yang penulis tawarkan Ekologi Pendidikan. Secara istilah Ekologi merupakan suatu pengetahuan secara umum mengaitkan hubungan-hubungan tital antara organisme dengan lingkungannya yang bersifat organik maupun anorganik (Mcnaughton dan Wolf, 1992). Diakui memang pada dasarnya ekologi Budaya merupakan merupakan studi keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya (Utina dan Banderan, 2009:11). Diakui ekologi diakui pada dasarnya persoalan yang meliputi komponen abiotik dan komponen biotik. Mulai dari suhu, air, cahaya hingga populasi, komunitas, dan ekosistem. Namun Akhir-akhir ini Ekologi secara berangsur berkembang, mempunyai hubungan dengan hampir semua ilmu tidak lagi terbatas pada kajian ekosistem atau alam, tetapi juga dipakai untuk mengaji bidang-bidang lainnya (Kaswadi, 2015). Dalam ekologi pendidikan, sekolah berperan dalam membagi ilmu pengetahuan yang terdiri dari komponen keluarga, sekolah dan lingkungannya (Nur Kholis & Rofikatul Karimah, 2017).

Penerapan Ekologi dalam Sistem Pendidikan dapat diutarakan karena adanya kesejajaran model ataupun sistem ekologi budaya dengan dinamika pendidikan. Sebenarnya jika ditinjau ulang pendidikan adalah proses dan (Tilaar, 1999; Rohidi, 2014). Kaitannya dengan Pelayanan Pendidikan, Sistem Ekologi dapat dipakai dan diartikan ekosistem pendidikan. Interaksi objek formal (penyelenggara pendidikan) dengan lingkungan masyarakat dan alam sekitar yang bersinergi hingga untuk dapat melangsungkan suatu pelayanan pendidikan untuk mengoptimalkan sesuai dengan SPM-Pendidikan.



Gambar 1. Sistem Ekologi dalam Layanan Pendidikan

Konsep ekologi sebagaimana yang disampaikan diatas, apabila ditarik kedalam SPM Pendidikan Ada tiga ranah dalam Sistem Ekologi Publik, Penyelenggara selaku Objek ataupun Lingkungan Formal, kemudian ada Lingkungan Masyarakat dan Lingkungan Alam yang memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan standar layanan pendidikan yang baik. Artinya dalam hal ini ketiga bagian tersebut merupakan suatu bagian yang harus saling berkontribusi dalam memberikan layanan pendidikan yang baik. Namun Lembaga sebagai objek formal yang utama dalam memfasilitasi terselenggaranya Sistem layanan pendidikan berbasis Ekologi tersebut.

Pemberian Standar Layanan Pendidikan berbasis Ekologi apabila beracuan pada Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan dan berpijak pada prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, maka prinsip-prinsip pelaksanaannya yakni membangun sebuah interaksi ekosistem sebagai berikut: (1) Lembaga Penyelenggara sebagai objek Formal; (2) Partisipasi Lingkungan Masyarakat; (3) Terintegrasi Lingkungan Alam.

Lembaga Penyelenggara Pendidikan harus menyadarinya sebagai aktor utama dalam pemberian pelayanan pendidikan berdasarkan prinsip Kesesuaian kewenangan dan Ketersediaan, serta dibutuhkan komitmen yang kongkret dalam pelayanan publik sebagaimana yang dimaksud (Anggraeni, 2014) Dibutuhkan komitmen serta model konkret dari seorang pemimpin guna mensukseskan program reformasi birokrasi. Triwiyanto (2013) menyatakan untuk melaksanakan suatu tatanan sistem yang baik apabila lembaga pendidikan menjadikan Standar Nasional Pendidikan sebagai indikator Mutu dan Layanan Pendidikan. dapat diaktualisasikan melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Interaksi Lembaga Penyelenggara Pendidikan meningkatkan kemampuan interaksi pada lingkungan serta upaya menunjukkan Kesan Pelayanan baik, Kemudian menyadari menjalin interaksi yang baik dengan pihak luar lembaga Fattah (2000:77) Hubungan lembaga pemerintah, masyarakat dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya dalam meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Untuk menjamin adanya sinergitas yang baik ditunjukkan adanya keseragaman pemahaman perencanaan ataupun upaya implementasinya. Dengan Adanya Interaksi yang baik antar lembaga penyelenggara Pendidikan dengan masyarakat Penyelenggara Bagi masyarakat memperoleh kepercayaan Akuntabilitas, Transparansi, serta memungkinkan pula masyarakat untuk turut berkontribusi pada penyelenggaraan Pendidikan.

Sebagaimana diamanatkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan (Pasal 8). Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan (Pasal 54 ayat 1) Kontribusi masyarakat dapat disalurkan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah. Kemudian daripada itu dalam lingkaran pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah, jadi sangat dimungkinkan pengaruhnya dalam mendukung jalannya pendidikan yang baik (Choiri, 2017; Rachamatika et al., 2021; Wahyudiana et al., 2021).

Penyelenggaraan Pendidikan Terintegrasi Lingkungan Alam, sebagaimana pada dasarnya manusia merupakan individu kompleks yang memiliki dinamika interaksi psikis dengan lingkungan (Khasanah & Fanani, 2020; T Mirzaqon & Purwoko, 2017). Begitupun yang dikatakan Karmanto et al(2015) Pendidikan menyediakan tempat khusus bagi lingkungan untuk dapat ikut berperan dalam memajukan taraf hidup manusia sehingga saat ini selalu dicanangkan dalam pendidikan bagaimana menjaga dan merawat lingkungan. Dari pernyataan tersebut dapat dimaknai interaksi Pendidikan dan Lingkungan, selain Alam mendapatkan suatu kelestarian dan keberlangsungan serta dimungkinkan peran dan kontribusi lingkungan alam yang banyak walaupun secara pasif.

Sebuah contoh kontribusi alam dalam penyelenggaraan pendidikan dalam standar isi dan proses pembelajaran menurut (Sugiarto, 2017) lingkungan alam dalam hal ini disebut kearifan ekologis dijadikan sumber belajar dalam pembelajaran seni. Demikian pula Dilfa et al (2020) sinergitas lingkungan menjadi sarana. Dalam konteks ekologi kita diminta memahami arti lebih lanjut memahami hubungan manusia dan alam dalam konteks penyelenggaraan pendidikan Lapka dan Sokolickova (2012)“*relationship of people and nature*” dimungkinkan akan banyak kontribusi lain selain isi dan proses juga sarana dan pembiayaan pendidikan.

Solusi yang ditawarkan atas konsepsi Ekologi Budaya untuk memaksimalkannya Standar Layanan Pendidikan tentunya harus melibatkan berbagai pihak dilingkungan sekitar dengan kata lain Lembaga Penyelenggara tetaplah sebagai aktor utama dan diminta mampu berinteraksi dengan lingkungan alam dan masyarakat menumbuhkan kembangkan pendidikan. Adanya sinergitas antara tiga ranah pendidikan tersebut memungkinkan standar pelayanan pendidikan akan lebih optimal. Dengan Catatan dilaksanakan secara bermutu, efektif dan efisien sesuai dengan SPM (Standar Layanan Minimum). Dengan Konsepsi Ekologi budaya sehingga Partisipasi lingkungan masyarakat dan kontribusi lingkungan alam dalam terhadap pendidikan merupakan aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya optimalisasi pendidikan.

Perlu disadari secara filosofis tanggung jawab pendidikan melekat pada keluarga, masyarakat dan pemerintah. Termasuk dalam semua bidang pendidikan (Kharismawati, 2022; Lestari, 2019; Nurjanah & Cahyana, 2021). Disini artinya keterkaitan dan saling ketergantungan antara masyarakat dan pihak penyelenggara Pendidikan mempersiapkan peserta didiknya untuk siap menjadi anggota masyarakat yang memiliki keterampilan hidup dan menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Nugraheny & Kusuma, 2018). Dalam kontek ini bagaimana upaya memberikan wadah atau ruang aktualisasi estetis dengan baik, berorientasi pada standar layanan pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama. Atas konsepsi Ekologi budaya mengundang kita semua berkewajiban memberikan partisipasi dan kontribusi atas kelangsungan regenerasi kesenian untuk kebutuhan peserta didik.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM-Pendidikan) ialah upaya pemerintah kepada peserta didik memberikan fasilitas pendidikan yang berhak diperoleh setiap masyarakat. SPM-Pendidikan juga menjadi acuan bagi penyelenggara pendidikan sebagaimana pada dasarnya yang termaktub pada pasal 1 ayat 2 pelayanan dasar adalah pelayanan publik berisi amanat yang berisi point-point pokok sebagai rambu-rambu ataupun pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Sistem Ekologi merupakan suatu tawaran konsepsi baru dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan standar layanan pendidikan. Dengan kesimpulan untuk implementasi SPM-Pendidikan yang optimal harus adanya Sinergitas antara Penyelenggara selaku objek Formal dengan Lingkungan sekitar (Lingkungan Masyarakat ataupun Lingkungan Alamiah) dengan kata lain Partisipasi lingkungan masyarakat dan kontribusi lingkungan alam dalam terhadap pendidikan merupakan aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya optimalisasi standar pelayanan yang bagus. Dengan kata lain lingkungan menjadi pertimbangan penting dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penelitian. Selain itu, kepada reviewer yang telah membantu memberikan kritik dan saran perbaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, R. (2011). *Standar Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Balangan*.
- Ahmad, S., & Diah, M. (2020). Strategi Pencapaian Standar Layanan Pendidikan Nonformal Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. *Tahdzibi*, 5(1), 49–56. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.5.1.49-56>
- Anggraeni, T. D. (2014). Menciptakan Sistem Pelayanan Publik yang Baik: Strategi Reformasi Birokrasi dalam Pemberantasan Korupsi. *Rechts Vinding*, 3((3)).
- As-sayyidi, N. (2016). Pendidikan Ekologi. *Hikmatuna*, 2(2), 183.
- Choiri, M. M. (2017). Upaya Pemanfaatan Lingkungan Sekitar sebagai Sumber Belajar Anak. *Refleksi Edukatika*, 8(1).
- Dilfa, A. H., Hartono, H., & Florentinus, T. S. (2020). Representation of Environmental Based Arts Education: A Case Study of Cultural Heritage Through The Balahak Performance in Siulak Mukai Kerinci Jambi. *Catharsis: Journal of Arts Education*, 9(2).
- Fajarisma, A., & Adam, B. (2014). Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup Pada Program Adiwiyata Mandiri di SDN Dinoyo 2 Malang. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 2(2), 166–173.
- Fattah, N. (2000). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Febrianshari, D., & dkk. (2018). Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Pembuatan Dompot Punch Zaman Now. *JP2SD: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan SD*, Volume 6,.
- Karmanto, E. D. M., Makmur, M., & Hayat, A. (2015). Kebijakan Pengintegrasian Pendidikan Lingkungan Hidup pada Sekolah “Adiwiyata.” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(12), 1981–1985.
- Kaswadi. (2015). Paradigma Ekologi dalam Kajian Satra. *Paramasastra*, 2 (2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26740/parama.v2n2.p%25p>
- Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, (2018).
- Kharismawati, S. A. (2022). Parental Involvement in the Learning Process During the Covid-19 Pandemic At SDN Remo. *Buana Pendidikan*, VOL. 18 NO.

<https://doi.org/https://doi.org/10.36456/bp.vol18.no1.a4962>

- Khasanah, N. R., & Fanani, A. (2020). Pengaruh Crossword Puzzle Berbasis 4C Terhadap Hasil Belajar Ipa Sekolah Dasar. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 16(30s), 41–48.
- Lapka, M., & Sokolickova, Z. (2012). *Cultural Ecology : Contemporary Understanding of the Relationship Between Humans and the Environment*. May 2014. <https://doi.org/10.2478/v10285-012-0050-z>
- Lestari, B. B. (2019). Interaksi Sosial Masyarakat di Komplek Rumah Susun Cipta Menanggal Surabaya. *Buana Pendidikan*, 15.
- Maryam, N. S. (2017). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. *JIPSI - Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 06.
- Nugraheny, D. C., & Kusuma, A. P. (2018). Neurolinguistik Programing dalam Bidang Pendidikan. *Buana Pendidikan*, VOL. 14 NO.
- Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. Pustaka Belajar.
- Nurjanah, N., & Cahyana, U. (2021). Pengaruh Penerapan Online Project Based Learning Dan Berpikir Kreatif Terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas IV Pada Pelajaran IPA Di SD Nasional 1 Kota Bekasi. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 17(1), 51–58.
- Rachamatika, T., Sumantri, M. S., Purwanto, A., Wicaksono, J. W., Arif, A., & Iasha, V. (2021). Pengaruh Model Pembelajaran Dan Kemandirian Belajar Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis IPA Siswa Kelas V SDN Di Jakarta Timur. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 17(1), 59–69.
- Raharjo, S. B. (2014). Kontribusi Delapan Standar Nasional Pendidikan terhadap Pencapaian Prestasi Belajar. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 20(4), 470. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i4.160>
- Rohidi, T. R. (2014). *Pendidikan Seni Isu dan Paradigma*. Cipta Prima Nusantara.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53.
- Sugiarto, E. (2017). Kearifan Ekologis sebagai Sumber Belajar Seni Rupa: Kajian Ekologi-Seni di Wilayah Pesisir Semarang. *Imajinasi: Jurnal Seni*, 11 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/imajinasi.v11i2.12815>
- T Mirzaqon, A., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal Mahasiswa Unnesa*, 8(1).
- Tilaar, H. A. . (1999). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Rineka Cipta.
- Triwiyanto, T. (2013). Standar Nasional Pendidikan sebagai Indikator Mutu Layanan Manajemen Sekolah. *Ilmu Pendidikan*, 19(2).
- Ulumudin, M. I., & Badrus, N. C. (2019). Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Blitar. *Al-Hikmah*, 7, 19–32.
- Umam, M. K. (2020). Dinamisasi Manajemen Mutu Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Hikmah*, 8, 61–74.
- Utina, R., & Banderan, D. W. K. (2009). *Ekologi dan Lingkungan Hidup*. UNG Press.
- Wahyudiana, E., Sagita, J., Iasha, V., Setiantini, A., & Setiarini, A. (2021). Problem-Based Learning-Based IPA Practicum Module to Improve Problem-Solving Ability. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 17(2), 161–167.
- Winarsih, S. (2017). Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pendidikan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Cendekia*, 15(1).
- Yuliawan, D., & Taryatman, T. (2020). Pendidikan Karakter Dalam Kajian Teori Ekologi Perkembangan. *TRIHALYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 7(1). <https://doi.org/10.30738/trihayu.v7i1.8405>